

Izin Berdemonstrasi

Oleh Ariel Heryanto

PERBINCANGAN tentang perlu-tidaknya prosedur resmi perizinan bagi kegiatan berdemonstrasi menjadi semakin seru. Ini layak mendapatkan perhatian, karena ia menukik pada salah satu inti persoalan etika, hukum, dan politik berdemonstrasi.

Kita bersyukur bahwa sejumlah pejuang hak-hak asasi manusia yang diwawancarai media massa telah menghantar kita menyimak pokok tersebut.

Hakikat demonstrasi

Protes yang disampaikan dalam bentuk demonstrasi pada dasarnya adalah sebuah pemberontakan bukan melulu terhadap sebuah pokok masalah atau peristiwa. Tetapi juga, dan ini yang lebih penting, pemberontakan terhadap berbagai cara atau bentuk komunikasi lain yang telah dikenal umum dan diresmikan sebagai yang lebih pantas, absah, terhormat atau santun.

Karena itu demonstrasi secara hakiki bersifat antiresmi. Ia tidak-resmi bukan karena belum punya izin dari polisi, tetapi karena ia menolak keresmian pranata perizinan itu sendiri maupun kewenangan pihak menjangkakan izin. Ia menyatakan kekecewaan atau kecurigaan pada jalur komunikasi yang resmi. Benar-tidaknya kecurigaan itu adalah soal lain.

Maka protes-demonstrasi bukanlah sekedar alat, cara atau metode menyampaikan sebuah gugatan, tuntutan, atau solidaritas dalam bentuk kata-kata dan gambar. Entah itu berwujud petisi, surat terbuka, pidato, puisi, atau poster. Semua yang secara formal kelihatannya menjadi pesan para demonstran sebenarnya bukanlah pesan utama dalam demonstrasi.

Sebuah demonstrasi menjadi bermakna justru karena pemberontakannya dalam wujud bentuk komunikasi itu sendiri! Ini yang menjadi pusat, inti

atau makna demonstrasi. Dalam pepatah Marshal McLuhan yang terkenal: "Medium is the Message".

Apa yang dicapai?

Karena itu sungguh keliru jika dari sebuah demonstrasi, yang diamati hanya kata-kata slogan dalam poster atau yel-yel mereka. Radikal atau tidaknya sebuah demonstrasi tidak terletak di sini. Kata-kata atau gambar yang sama dapat dipublikasi dalam bentuk lain yang lebih patuh pada ketentuan resmi. Bila dinyatakan dalam medium komunikasi yang lain, kata-kata itu maknanya jadi sangat berbeda. Sama kelirunya kebiasaan orang mencari rahasia kehebatan Iwan Fals mania dengan menganalisa lirik-lirik lagunya, kata-kata mati di atas kertas.

Bandingkan kata-kata tajam dalam demonstrasi di depan Gedung DPR belakangan ini dengan beberapa pengandaian berikut ini. Misalnya, kata-kata yang sama dikutip dalam berkas dakwaan jaksa terhadap demonstran yang kemudian diadili. Atau, kata-kata yang sama dinyatakan dalam sebuah adegan demonstrasi (mirip yang terjadi di DPR) dalam pemertasan teater di gedung kesenian.

Begitu pula kesalahan banyak pengamat sosial-politik yang menuduh para mahasiswa demonstrasi masa kini tak punya konsep yang jelas. Seakan-akan demonstrasi merupakan sebuah proyek penelitian ilmiah. Begitu pula naifnya mereka yang mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan gelombang demonstrasi mahasiswa hanya berdasarkan kata-kata gugatan dalam poster mereka: ganyang ini, bubarkan itu, atau bebaskan si anu. Hal-

hal itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Bila terjadi pasti bukan melulu karena jasa demonstrasi mahasiswa. Bila tidak terjadi bukan berarti tindakan demonstrasi itu kesia-siaan belaka.

Mungkin saja para demonstran itu sendiri tidak ingat apa yang pernah dituntutnya dalam poster sebulan lalu. Mereka sibuk mengikuti berbagai demonstrasi lain yang terjadi kemudian dengan aneka slogan-slogan tuntutan lain. Kalaupun demonstrasi mahasiswa tidak secara langsung menciptakan perubahan sosial seperti yang ditulis dalam poster mereka, peristiwa itu punya serangkaian dampak dan makna sosial yang penting.

Misalnya hal itu menyegarkan kembali nurani masyarakat yang terlalu lama apatis. Atau menjadi ajang pendidikan bagi para aktivis muda itu untuk berorganisasi politik secara praktis. Pendidikan yang merdeka dari campur-tangan penguasa demikian tidak mereka peroleh dari universitas atau partai politik mana pun. Sementara kasus demi kasus datang silih berganti dan dilupakan, begitu pula slogan protes terhadapnya, jaringan kerja sama para demonstran bertumbuh terus semakin kokoh.

Izin berdemonstrasi?

Demonstrasi tak mungkin meminta atau mendapatkan izin resmi dari lembaga eksternal macam apa pun. Dengan meminta atau mendapatkan izin, misalnya dari kepolisian, sebuah demonstrasi akan berubah menjadi pawai atau arak-arakan karnaval.

Dengan mengakui lembaga perizinan dan pihak yang berwenang mengeluarkan izin, sebuah demonstrasi tidak lagi diperlukan. Aparatur negara ma-

sih dipercayai. Orang yang reah secara sosial cukup memin-ta pihak yang dianggapnya berwenang untuk menuntaskan persoalan yang meresahkan secara sah.

Disadari atau tidak, usulan mengadakan perizinan bagi demonstrasi bukanlah usulan yang bodoh. Justru sebaliknya. Usulan itu tumbuh dari pemikiran yang lebih cemerlang dalam memahami hakikat demonstrasi daripada kebanyakan wawasan sarjana sosial yang suka meremehkan kegiatan para demonstran.

Lembaga perizinan demonstrasi tidaklah perlu terlalu repot mempersoalkan kata-kata atau slogan yang disiapkan calon demonstran. Petugas perizinan tidak perlu mahir berdebat dengan calon demonstran tentang pantas atau tidaknya sebuah gambar atau kata-kata untuk dibawa dalam demonstrasi. Fungsi utama lembaga perizinan bukanlah menyensor kata-kata atau orang tertentu.

Secara potensial lembaga perizinan berfungsi mematahkan kekuatan inti demonstrasi: yakni sebuah pemberontakan terhadap komunikasi yang resmi. Atau berbentuk komunikasi sebagai pemberontakan. Lembaga perizinan menaklukkan demonstrasi yang hakikatnya bersifat spontan dan anti-resmi.

Dalam prakteknya, bila peraturan perizinan itu diberlakukan, prosedurnya akan memunculkan berbagai tetek-bengek lain yang bersifat teknis. Misalnya kelengkapan bahan lampiran, berapa hari diajukan sebelum turun ke jalan, atau nama dan alamat lengkap penanggung jawab. Namun, soal-soal teknis begini dapat mudah diajukan ke permukaan sebagai persoalan yang seakan-akan paling pokok. Dengan demikian perdebatan antara pemin-ta dan pemberi izin dapat dikurung sebatas persoalan-persoalan teknis itu.

Sumber segala perizinan

Berbagai contoh kasus komunikasi politik di masyarakat kita menunjukkan betapa sering perkara teknis telah menimbuni hal-hal etis atau politis yang bersifat pokok dan mendasar.

Misalnya, dalam berbagai kasus pencekalan terhadap intelektual sebagai pembicara dalam seminar kita diajak berdebat soal-soal teknis prosedural perizinan. Jarang atau kurang kita langsung menukik ke persoalan utamanya: apakah perizinan begitu memang diperlukan? Diperlukan siapa? Apa dasarnya? Mengapa?

Kita bersyukur ada berbagai pihak (pejabat pemerintah, anggota Komisi Nasional HAM, advokat) yang telah memberikan perhatian dan simpati kepada para mahasiswa yang baru-baru ini ditahan di Jakarta karena berdemonstrasi. Kita berharap perhatian dan simpati itu tidak terbatas hanya pada kondisi para tahanan selama di penjara atau bantuan hukum bagi mereka di persidangan. Yang jauh lebih penting adalah menimbang kembali pantaskah para aktivis mahasiswa itu ditahan? Pantaskah kita menggunakan delik-delik hukum yang dibikin dan dipakai penguasa kolonial untuk menahan dan mengadili aktivis yang telah mendirikan republik ini?

Tentu saja ada yang lebih penting daripada semua itu. Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Sesungguhnya rakyat tak akan pernah butuh berdemonstrasi bila kedaulatan tertinggi di tangannya. Rakyatlah sumber tertinggi segala bentuk perizinan. Bukan pengemis perizinan. Kepada rakyatlah semua pihak lain layak meminta izin. Tidaklah lebih pantas bila kita menuntut ke pengadilan siapa pun yang di depan umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada rakyat Indonesia?

* **Ariel Heryanto**, staf pengajar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.